

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepercayaan publik merupakan elemen paling penting bagi legitimasi dan kewibawaan institusi penegak hukum di negara demokrasi. Namun demikian, dinamika kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia sering kali menunjukkan tren yang sangat fluktuatif, rentan, dan belum stabil. Kepercayaan masyarakat dapat meningkat secara tajam ketika lembaga penegak hukum berhasil menangani atau mengungkap kasus-kasus besar yang menyita perhatian nasional. Akan tetapi, apresiasi tersebut umumnya hanya berlangsung sementara dan dapat kembali menurun ketika muncul pelanggaran etik, penyalahgunaan wewenang, atau ketidaksesuaian tindakan yang dilakukan oleh aparat itu sendiri. Fenomena ini membuktikan bahwa legitimasi hukum dan opini publik tidak bersifat statis, melainkan sangat dipengaruhi oleh konstruksi peristiwa dan manajemen isu yang bergulir di ruang publik (Cutlip, 2013). Masyarakat memiliki kecenderungan untuk melakukan generalisasi, deviasi atau kesalahan satu oknum di dalam tubuh penegak hukum akan secara otomatis merusak reputasi dan dipersepsikan sebagai cerminan kegagalan institusi secara keseluruhan (Imanuddin, 2026).

Indikasi empiris mengenai belum stabilnya legitimasi penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui rilis *Corruption Perceptions Index* (CPI) oleh Transparency International. Dalam laporan CPI 2024 yang dirilis pada Februari 2025, Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dan menempati peringkat 99 dari 180 negara yang disurvei. Angka yang cenderung stagnan ini secara tidak langsung merepresentasikan skeptisisme yang masih mengakar di tengah masyarakat mengenai integritas penegakan hukum di Indonesia. Situasi ini bukan semata-mata menunjukkan adanya problem struktural dalam sistem peradilan, melainkan sebuah krisis pada aspek komunikasi dan manajemen persepsi. Stigma klasik yang telah

lama mengendap di benak publik, seperti perkataan bahwa hukum "tumpul ke atas dan tajam ke bawah" menciptakan jarak psikologis yang nyata. Semakin institusi penegak hukum dipersepsikan formal, kaku, elitis, dan berjarak dari realitas keseharian, semakin sulit bagi masyarakat untuk memvalidasi rasa keadilan dan menaruh kepercayaan terhadap institusi tersebut (Amelia, 2025).

Tantangan komunikasi kehumasan pemerintah di era modern dari perspektif Hubungan Masyarakat (Humas) atau *Public Relations* (PR), rendahnya tingkat kedekatan emosional masyarakat terhadap institusi negara mengindikasikan adanya ruang kosong dalam strategi komunikasi pemerintahan yang ada selama ini. Praktik humas pemerintahan secara tradisional cenderung terjebak pada pendekatan transmisi informasi satu arah, yang lebih memprioritaskan kuantitas sosialisasi kebijakan dibandingkan kualitas interaksi dan partisipasi publik (Nugraha, Sjoraida, & Novianti, 2022). Humas lembaga negara umumnya memproduksi rilis berita atau publikasi statistik penanganan perkara yang didominasi akan bahasa hukum dan birokrasi. Meskipun informasi tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas formal, pendekatan komunikasi yang terlalu berorientasi pada prosedur sering kali belum mampu membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Efektivitas pesan dalam perspektif komunikasi tidak hanya ditentukan oleh penyampaian informasi, tetapi juga oleh kemampuan pesan memengaruhi aspek psikologis khalayak (Effendy, 2014). Kondisi tersebut menjadi penting mengingat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum masih menjadi persoalan yang terus dibahas dalam berbagai kajian hukum dan sosial di Indonesia (Rizhan, 2023).

Perkembangan teknologi komunikasi kemudian mendorong berbagai instansi pemerintah, termasuk lembaga hukum, untuk melakukan transformasi komunikasi publik melalui digitalisasi layanan dan penyebaran informasi. Kendati digitalisasi terbukti ampuh dalam meningkatkan kecepatan akses dan diseminasi informasi ke masyarakat luas, karakteristik media digital itu sendiri menghadirkan tantangan baru (Nugraha et al., 2022). Informasi yang beredar melalui media sosial cenderung dikonsumsi secara cepat, singkat, dan terus tergantikan oleh arus konten baru sehingga perhatian audiens menjadi semakin pendek. Laporan OECD (2021)

mengenai *21st-Century Readers* menjelaskan bahwa intensitas penggunaan media digital tidak selalu diikuti oleh peningkatan kemampuan membaca secara mendalam. Sebaliknya, paparan informasi digital yang bersifat cepat justru mendorong pola membaca yang lebih dangkal sehingga proses refleksi, pemaknaan, dan retensi informasi menjadi lebih rendah dibandingkan ketika membaca teks panjang dalam media cetak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital memang penting, tetapi belum sepenuhnya mampu menggantikan kebutuhan akan media komunikasi yang memberikan ruang bagi pembaca untuk membangun keterlibatan emosional secara lebih mendalam.

Kondisi tersebut diperkuat oleh penelitian Clinton (2019) melalui meta-analisis terhadap puluhan penelitian mengenai media baca yang menunjukkan bahwa pembaca cenderung memiliki tingkat pemahaman bacaan yang lebih baik ketika membaca melalui media cetak dibandingkan melalui layar digital, khususnya untuk bacaan yang bersifat panjang dan kompleks. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Delgado et al. (2018) yang menyatakan bahwa media cetak masih memberikan keunggulan dalam membangun konsentrasi, retensi informasi, dan *deep reading*, sedangkan media digital lebih efektif digunakan untuk memperoleh informasi secara cepat. Perkembangan media digital tidak menghilangkan fungsi buku sebagai media komunikasi, tetapi justru menempatkan buku sebagai medium yang saling melengkapi media digital dalam membangun pemahaman dan keterikatan emosional pembaca. Berdasarkan kondisi tersebut, institusi publik memerlukan inovasi strategi komunikasi yang tidak hanya berorientasi pada penyebaran informasi, tetapi juga mampu menghadirkan pengalaman membaca yang lebih reflektif, personal, dan berkesan bagi masyarakat.

Tantangan dalam membangun kedekatan emosional publik tersebut turut menjadi perhatian Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan institusi penegak hukum yang tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga memiliki mandat edukasi hukum kepada masyarakat. Institusi ini dituntut mampu membangun hubungan yang lebih terbuka, partisipatif, dan humanis dengan publik. Pada tingkat daerah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) memegang peranan strategis sebagai representasi institusi kejaksaan di tingkat provinsi dalam

menjembatani hubungan antara negara dan masyarakat. Pengelolaan komunikasi publik tersebut dilaksanakan oleh Bidang Intelijen melalui Seksi Penerangan Hukum (Penkum) yang bertanggung jawab menyusun strategi publikasi, diseminasi informasi hukum, edukasi masyarakat, serta penguatan citra institusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Triono selaku Kepala Seksi Penkum Kejati Jateng (komunikasi pribadi, 2025), diketahui bahwa stakeholder Kejaksaan memiliki karakteristik yang sangat beragam, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, akademisi, media massa, hingga masyarakat umum. Di antara berbagai kelompok tersebut, pelajar dan mahasiswa awal menjadi salah satu sasaran strategis karena berada pada fase pembentukan cara pandang terhadap institusi publik, salah satunya adalah Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum. Kondisi tersebut mendorong Kejaksaan mengembangkan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebagai media edukasi hukum sekaligus sarana membangun hubungan yang lebih dekat dengan generasi muda. Program ini telah ditetapkan secara nasional melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-184/A/JA/11/2015 dan secara berkelanjutan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan di Indonesia.

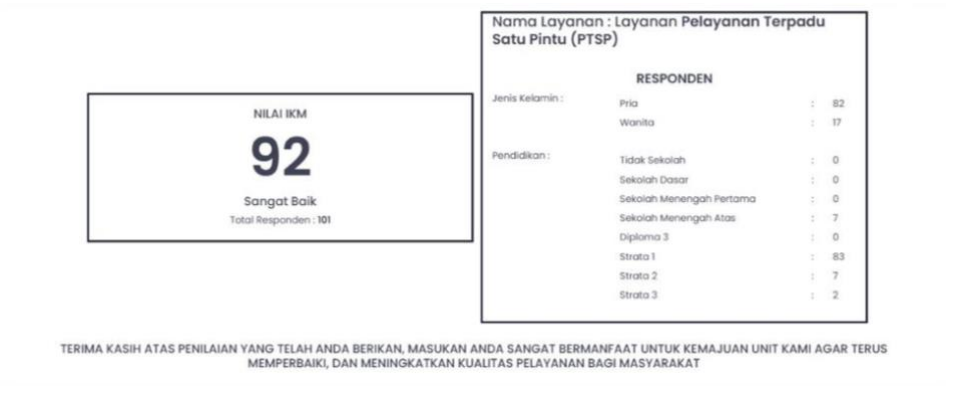
Sebagai salah satu program komunikasi publik yang secara konsisten dilaksanakan oleh Kejati Jateng, efektivitas Program JMS turut dievaluasi melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan dan pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh Kejati Jateng. Selain Program JMS, penilaian IKM juga mencakup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai salah satu bentuk layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Hasil pengukuran IKM tersebut disajikan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 sebagai berikut

Gambar 1.1 Hasil IKM Program JMS Tahun 2025



(Sumber : kejati-jawatengah.kejaksaan.go.id)

Gambar 1.2 Hasil IKM Program PTSP Tahun 2025



(Sumber : kejati-jawatengah.kejaksaan.go.id)

Berdasarkan hasil evaluasi IKM Kejati Jateng pada awal tahun 2025, pelaksanaan komunikasi publik menunjukkan capaian yang positif. Untuk hasil evaluasi program PTSP memperoleh nilai 92 dengan predikat "Sangat Baik" sedangkan untuk Program JMS memperoleh nilai 84 dengan predikat "Baik". Capaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memberikan penilaian yang baik terhadap kualitas layanan maupun pelaksanaan program komunikasi publik yang diselenggarakan oleh Kejati Jateng. Berdasarkan rincian hasil evaluasi IKM, penilaian pada Program JMS didominasi oleh responden yang berasal dari kalangan pelajar dan guru pendamping sebagai peserta kegiatan. Penilaian tersebut berfokus pada aspek penyelenggaraan program, seperti kualitas penyampaian materi oleh

narasumber, kejelasan komunikasi selama kegiatan berlangsung, serta kesesuaian materi penyuluhan hukum dengan kebutuhan peserta.

Meskipun demikian, hasil IKM pada dasarnya hanya mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program dan kualitas layanan yang diberikan. R. Risti, selaku Pranata Humas Kejati Jateng, menjelaskan bahwa instrumen IKM belum mampu menggambarkan apakah peserta benar-benar merasa lebih dekat dengan institusi Kejaksaan atau mengalami perubahan persepsi setelah mengikuti Program JMS (komunikasi pribadi, 2025). Dengan demikian, meskipun capaian IKM menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan dengan baik, masih diperlukan identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana komunikasi publik yang dilakukan mampu membangun kedekatan emosional, mengurangi stigma negatif, serta meningkatkan citra Kejaksaan di kalangan generasi muda.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi yang perlu mendapat perhatian. Program JMS terbukti efektif dalam meningkatkan aspek kognitif, yaitu memperluas pengetahuan siswa mengenai tugas, fungsi, dan peran Kejaksaan serta memberikan pemahaman dasar mengenai hukum. Namun, keberhasilan tersebut belum tentu diikuti oleh terbentuknya aspek afektif, yaitu tumbuhnya rasa kedekatan, kepercayaan, dan keterikatan emosional terhadap institusi Kejaksaan. Dengan kata lain, meningkatnya pengetahuan tentang hukum tidak serta-merta mendorong perubahan persepsi maupun membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis melakukan pra-survei terhadap 76 siswa yang telah mengikuti Program JMS di SMA Negeri 2 Semarang dan SMA Negeri 6 Semarang. Pra-survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi pelajar terhadap Kejati Jateng, mengevaluasi preferensi mereka terhadap media komunikasi publik yang digunakan, serta mengidentifikasi kebutuhan media komunikasi yang mampu membangun kedekatan emosional antara institusi Kejaksaan dengan generasi muda. Responden dalam pra-survei ini merupakan siswa berusia 15–18 tahun yang menjadi sasaran Program JMS. Sebagai konteks

awal, karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Gambar 1.3.

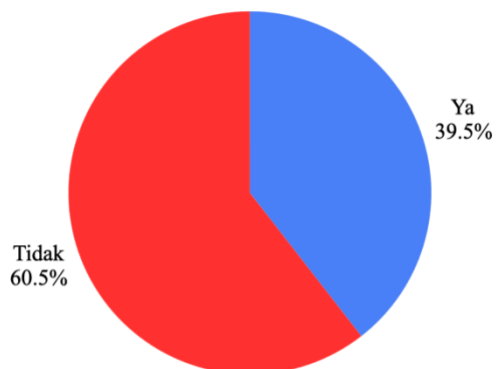
Gambar 1.3 Hasil Pra Survey Tingkatan Kelas Pendidikan Audiens



(Sumber : Dokumen Milik Pribadi)

Hasil diagram diatas menunjukkan bahwa, mayoritas responden merupakan siswa kelas 11 sebanyak 51,4%, kemudian diikuti oleh siswa kelas 12 sebanyak 48,6%. Hasil tersebut menjelaskan bahwa jumlah responden dari kedua Tingkat Pendidikan relatif seimbang, sehingga mampu memberikan Gambaran persepsi yang representatif mengenai pelaksanaan Program JMS. Karakteristik responden ini dinilai sesuai dengan target audiens pengembangan media komunikasi publik Kejati Jateng, yaitu pelajar Tingkat SMA.

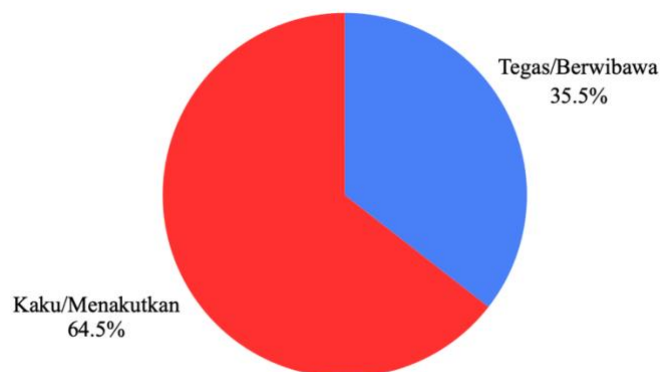
Gambar 1.4 Hasil pemahaman audiens terkait tugas pokok dan fungsi Institusi Kejaksaan.



(Sumber : Dokumen Milik Pribadi)

Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman audiens terhadap tugas pokok dan tupoksi Institusi Kejaksaan di Indonesia, termasuk Kejati Jateng, diperoleh data yang menunjukkan masih rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap institusi penegak hukum tersebut. Dari total 76 responden yang berpartisipasi, mayoritas audiens, yakni sebanyak 46 siswa (60,5%), menyatakan tidak memahami tupoksi dari Kejaksaan. Sementara itu, hanya 30 siswa (39,5%) responden yang menjawab bahwa mereka sudah memahaminya. Tingginya persentase ketidakpahaman ini mengindikasikan adanya kesenjangan informasi antara institusi dengan pelajar. Kondisi ini sekaligus menjadi alasan yang kuat mengenai urgensi perancangan media komunikasi publik yang lebih ringan, humanis, dan mudah diakses seperti buku antologi guna mengedukasi dan mendekatkan institusi Kejaksaan kepada masyarakat luas.

Gambar 1.5 Hasil terkait citra/kesan terhadap Kejati Jateng

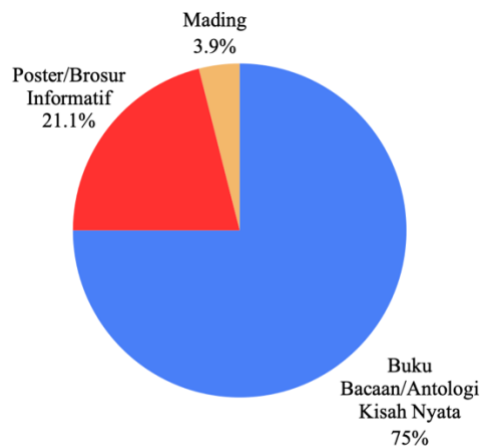


(Sumber : Dokumen Milik Pribadi)

Grafik di atas menunjukkan hasil pra-survei mengenai penilaian citra atau kesan audiens terhadap Kejati Jateng pada saat ini. Survei yang menargetkan kalangan pelajar ini melibatkan 76 orang siswa sebagai responden. Berdasarkan hasil pengumpulan data, mayoritas responden, yakni sebanyak 49 siswa atau sebesar 64,5%, memberikan penilaian bahwa Kejati Jateng memiliki kesan yang kaku dan menakutkan. Sementara itu, sebanyak 27 siswa atau sekitar 35,5% dari total responden menilai institusi ini terkesan tegas dan berwibawa. Secara

keseluruhan, data ini merepresentasikan bahwa wajah institusi penegak hukum di mata pelajar masih cenderung dilihat dari sisi formalitas yang kaku dibandingkan sisi kewibawaan yang mengayomi.

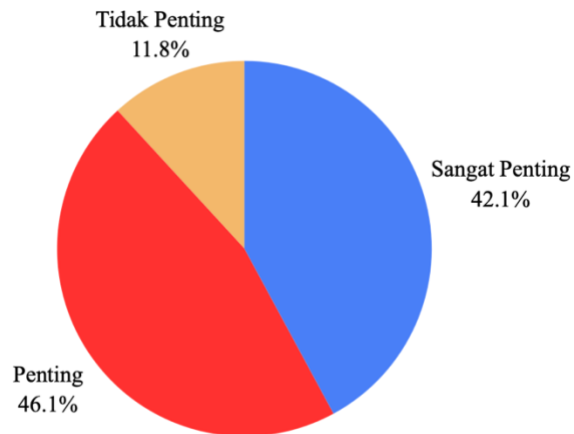
Gambar 1.6 Hasil pra-survey terkait evaluasi efektivitas media cetak/offline



(Sumber : Dokumen Milik Pribadi)

Grafik di atas menyajikan hasil pra-survei mengenai efektivitas media cetak atau luring (*offline*) yang dianggap paling berkesan dalam menyampaikan narasi atau kisah-kisah humanis. Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden, yaitu sebanyak 57 siswa atau setara dengan 75%, menilai bahwa buku antologi atau antologi kisah nyata adalah media cetak yang paling efektif. Media penyampaian informasi yang lebih singkat seperti poster atau brosur menempati urutan kedua dengan perolehan 16 tanggapan (21,1%). Sementara itu, mading (majalah dinding) menjadi opsi yang paling sedikit dipertimbangkan, yakni hanya dipilih oleh 3 siswa (3,9%). Secara keseluruhan, data ini merepresentasikan dominasi preferensi pelajar terhadap buku antologi dibandingkan dengan media cetak dua dimensi konvensional lainnya ketika dihadapkan pada konten yang bersifat penceritaan (*storytelling*).

Gambar 1.7 Hasil pra-survey terkait esensial buku cetak di perpustakaan sekolah



(Sumber : Dokumen Milik Pribadi)

Grafik di atas memaparkan hasil pra-survei mengenai pandangan siswa terhadap tingkat pentingnya keberadaan buku cetak atau fisik di perpustakaan sekolah di tengah maraknya penggunaan media digital. Berdasarkan data yang terkumpul, sebanyak 35 responden (46,1%) menyatakan bahwa buku cetak itu "penting", dan 32 responden (42,1%) menyatakan "sangat penting". Sementara itu, hanya 9 responden (11,8%) yang berpandangan bahwa buku cetak tidak penting. Secara keseluruhan, data ini merepresentasikan bahwa mayoritas pelajar di sekolah tetap mengakui nilai strategis dan fungsional dari buku fisik sebagai sarana literasi di lingkungan sekolah, meskipun mereka hidup berdampingan dengan ekosistem digital.

Pengembangan buku antologi sebagai media *Narrative* PR perlu memadukan kisah-kisah humanis dengan desain visual yang sesuai dengan karakteristik generasi muda agar mampu menarik minat baca, membangun kedekatan emosional, serta memperkuat citra positif Kejati Jateng di kalangan pelajar SMP/SMA.

Secara keseluruhan, temuan empiris yang diperoleh dari pra-survei terhadap pelajar di dua SMA Negeri di Kota Semarang memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan buku antologi berbasis *Narrative* PR sebagai media komunikasi Kejati Jateng. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media ini tidak hanya sesuai

dengan preferensi target audiens, tetapi juga memiliki potensi untuk menjembatani kesenjangan persepsi sekaligus menghadirkan citra institusi yang lebih humanis. Pemilihan pelajar sebagai target audiens primer didasarkan pada karakteristik usia remaja hingga dewasa awal, yaitu fase ketika individu mulai membentuk pengetahuan, sikap, serta opini terhadap berbagai institusi publik. Persepsi yang terbentuk pada tahap ini berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan dan hubungan mereka dengan institusi dalam jangka panjang, sehingga generasi muda menjadi kelompok strategis dalam upaya membangun citra positif Kejati Jateng.

Karakteristik tersebut juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi komunikasi yang digunakan. Meskipun Generasi Z merupakan kelompok yang sangat akrab dengan media digital, mengarahkan pelajar sebagai target audiens untuk memperoleh informasi melalui rilis pers yang dipublikasikan di situs web institusi belum tentu menjadi pendekatan yang efektif dalam membangun pemahaman maupun kedekatan emosional. Penelitian Clinton (2019) menunjukkan bahwa pemahaman membaca cenderung lebih mendalam ketika informasi disajikan melalui media cetak dibandingkan melalui layar digital. Temuan tersebut selaras dengan hasil pra-survei yang menunjukkan bahwa mayoritas responden masih memandang buku cetak sebagai media yang penting dan lebih memilih buku antologi sebagai sarana untuk mengenal sisi humanis Kejaksaan. Oleh karena itu, institusi memerlukan strategi komunikasi yang tidak hanya mempertimbangkan pemilihan media, tetapi juga cara penyampaian pesan. Pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui konsep *Narrative PR* yang memanusiakan institusi melalui penyampaian cerita yang autentik (Alvianna & Alviandra, 2021). Sejalan dengan paradigma naratif yang dikemukakan Fisher (1984), manusia pada hakikatnya merupakan *homo narrans* atau makhluk pencerita, sehingga pesan yang dikemas dalam bentuk narasi lebih mudah dipahami, dipercaya, serta mampu membangun keterlibatan emosional dibandingkan penyampaian informasi yang bersifat faktual semata. Melalui teknik *storytelling*, berbagai pengalaman nyata, dilema moral, hingga sisi humanis kehidupan seorang jaksa dapat disampaikan secara lebih dekat kepada masyarakat tanpa mengurangi substansi penegakan hukum yang menjadi tugas institusi.

Temuan pra-survei tersebut juga diperkuat oleh berbagai penelitian mengenai perilaku literasi Generasi Z. Fajrina dan Purba (2024) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital tidak menghilangkan minat membaca generasi muda, melainkan mengubah cara mereka menemukan, memilih, dan mengakses bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan serta ketertarikannya. Temuan tersebut selaras dengan Kajian Tingkat Gemar Membaca Nasional yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2024), yang menunjukkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia berada pada kategori tinggi dengan skor 72,44. Sementara itu, Baron (2021) mengemukakan bahwa meskipun Generasi Z sangat akrab dengan teknologi digital, buku cetak tetap menjadi pilihan ketika pembaca membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi dan pemahaman yang lebih mendalam. Tantangan utama bagi institusi bukan terletak pada rendahnya minat membaca generasi muda, melainkan pada kemampuan menghadirkan media literasi yang relevan, menarik, serta mampu memberikan pengalaman membaca yang bermakna.

Berangkat dari hasil identifikasi masalah, temuan pra-survei, karakteristik Generasi Z, serta landasan konsep *Narrative PR*, penulis mengembangkan media komunikasi publik berupa buku antologi berjudul *Beyond Law Enforcement: Ragam Kisah dan Perspektif Stakeholder Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah*. Buku ini dirancang sebagai media yang menghadirkan berbagai kisah, pengalaman, dan perspektif dari beragam stakeholder Kejati Jateng, mulai dari pimpinan, jaksa, pegawai, mitra kerja, hingga akademisi dan masyarakat yang pernah berinteraksi dengan institusi tersebut. Produk dikembangkan dalam format *pocket book* berukuran 12 × 20 cm agar praktis dibawa dan nyaman dibaca oleh pelajar SMP/SMA serta mahasiswa, dengan menerapkan sistem tipografi yang mengutamakan keterbacaan sehingga tidak memberikan kesan seperti membaca buku pelajaran. Selain tersedia dalam bentuk buku cetak yang akan didistribusikan ke perpustakaan sekolah mitra Program JMS produk ini juga disajikan dalam format *e-book* yang dapat diakses melalui *QR Code* sebagai bentuk adaptasi terhadap kebiasaan konsumsi informasi Generasi Z. Melalui pendekatan *storytelling* yang mengangkat sisi humanis institusi, buku antologi ini

diharapkan mampu menjadi media komunikasi publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kedekatan emosional, mengurangi stigma negatif terhadap lembaga penegak hukum, serta memperkuat citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Rendahnya keterhubungan emosional masyarakat, khususnya generasi muda terhadap peran dan fungsi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdampak pada belum optimalnya tingkat kepercayaan publik. Meskipun Seksi Penkum Kejati Jateng telah melaksanakan berbagai program komunikasi publik dan digitalisasi, pendekatan tersebut masih cenderung bersifat informatif satu arah dan belum mampu meminimalisir persepsi kaku di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, permasalahan utama dalam Tugas Akhir ini difokuskan pada ketiadaan media komunikasi efektif yang mampu mereduksi jarak psikologis publik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan ini diarahkan pada proses perancangan dan produksi buku antologi sebagai instrumen *Narrative PR*. Proses penyelesaian masalah ini mencakup penggabungan elemen *storytelling* di dalam teks untuk merepresentasikan sisi humanis institusi guna membangun kedekatan emosional pembaca. Selanjutnya, guna memastikan efektivitas luaran karya, penyelesaian masalah ini juga mencakup pengujian tingkat kelayakan buku antologi tersebut sebagai media kehumasan strategis melalui tahapan validasi bersama pihak Kejati Jateng selaku klien.

1.3 Tujuan

Pengkaryaan tugas akhir ini bertujuan untuk menghasilkan buku antologi berjudul “*Beyond Law Enforcement: Ragam Kisah dan Perspektif Stakeholder Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah*” sebagai media komunikasi efektif berbasis *Narrative PR* sebagai pendukung komunikasi publik Kejati Jateng dalam

membangun kedekatan emosional masyarakat, khususnya pelajar usia 15–22 tahun, serta memperkuat citra humanis dan kepercayaan publik terhadap institusi.

1.4 Manfaat

Pelaksanaan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis bagi berbagai pihak yang terlibat, antara lain sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, pengkaryaan ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian keilmuan di bidang Informasi dan Humas, khususnya mengenai implementasi *Narrative* PR pada institusi pemerintahan. Pengkaryaan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi pengkaryaan selanjutnya yang berfokus pada pemanfaatan media cetak (buku) dan teknik *storytelling* sebagai instrumen komunikasi strategis dalam mereduksi jarak psikologis antara lembaga penegak hukum dan publik. Lebih spesifik, pendekatan *Narrative* PR dalam institusi penegak hukum memberikan kontribusi kebaruan paradigma komunikasi yaitu bagaimana pendekatan *Narrative* PR dapat meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat legitimasi institusi penegak hukum melalui penyampaian pesan yang lebih humanis, kontekstual, dan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya generasi muda.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil pengkaryaan berupa abuku antologi ini diharapkan dapat menjadi luaran yang aplikatif bagi Kejati Jateng, khususnya Unit Penkum untuk dapat diimplementasikan sebagai sarana edukasi hukum dan media komunikasi institusional dalam mendukung keberlanjutan program JMS. Karya ini dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai instrumen *Corporate* PR, *merchandise* kegiatan, maupun referensi alternatif dalam merancang strategi komunikasi publik yang lebih efektif dan humanis, di luar pendekatan informasi formal yang selama ini digunakan. Selain itu, hasil perancangan ini juga dapat menjadi acuan

percontohan bagi institusi kejaksaan atau lembaga pemerintah lainnya dalam mengembangkan media komunikasi berbasis narasi.

1.4.3 Manfaat Sosial

Secara sosial, produk dari pengkaryaan ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat terhadap dinamika, peran, dan fungsi lembaga penegak hukum. Melalui pendekatan komunikasi naratif yang menonjolkan empati dan humanisme para insan adhyaksa, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda dapat melihat sisi lain dari institusi yang selama ini kurang terekspos, sehingga mampu mengikis stigma kaku yang berkembang dan menumbuhkan rasa percaya di tengah masyarakat.

1.5 Luaran

Luaran yang dihasilkan dari pengkaryaan Tugas Akhir ini berupa media komunikasi publik berbentuk buku antologi berjudul “*Beyond Law Enforcement: Ragam Kisah dan Perspektif Stakeholder Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah*” dengan ukuran 12 × 20 cm. Buku ini memuat kumpulan kisah, pengalaman, dan perspektif dari berbagai stakeholder sebagai media komunikasi publik Kejati Jateng yang menerapkan pendekatan *Narrative PR* melalui teknik *storytelling*. Produk akhir disajikan dalam dua bentuk, yaitu buku cetak yang akan didistribusikan kepada perpustakaan sekolah mitra Program JMS serta buku digital (*e-book*) yang dapat diakses melalui pemindaian QR Code. Buku cetak diproduksi melalui pihak penerbit dan dilengkapi dengan nomor QRCBN sebagai identitas resmi penerbitan buku. Selain itu, sebagai bentuk perlindungan terhadap karya intelektual, buku antologi ini direncanakan untuk didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) guna memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).